

DIKOTOMI ORGANISASI PENDIDIKAN

Harapan dan Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Muh. Hambali¹

A. Pendahuluan

Domain pendidikan adalah wilayah yang dinamis, selalu bergerak, selalu terjadi perubahan dan pembaharuan. Sekolah seolah terus berpacu memunculkan dan mengejar keunggulannya masing-masing. Era globalisasi menjadi satu tantangan tersendiri bagi penyelenggara pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dan sarana pendidikan dengan berbagai teknologi canggih agar menghasilkan siswa yang mampu berkompetisi di era *global village*.

Era globalisasi adalah sebuah era terbuka karena persaingan antar bangsa menjadi semakin nyata. Sebagai sebuah bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari komunitas internasional, untuk selanjutnya mampu menunjukkan daya saingnya dalam komunitas internasional tersebut. Kemampuan bersaing dalam komunitas internasional hanya dapat diperoleh dengan membangun kualitas sumber daya manusia bangsa (*human resources*).

Berbagai fakta pembangunan kualitas sumber daya manusia oleh beberapa lembaga survei multinasional disebut sebagai *Human Development Index* (HDI). Pada survei tahun 2002, menurut hasil survei UNDP, kualitas SDM Indonesia ternyata hanya menduduki urutan 110 dari 179 negara di dunia. Posisi Indonesia hanya satu tingkat di atas Vietnam, dan jauh tertinggal di bawah Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Jika dibandingkan dengan India, Indonesia sangat jauh tertinggal.

HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indikator yang digunakan dalam HDI meliputi tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu :

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

¹Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Malik Ibrahim Malang dan STIT Urwatul Wutsqo Bulurejo Jombang.

2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita *gross domestic product* atau produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli *purchasing power parity* dalam dollar AS

Pada tahun 2007, angka HDI Indonesia mengalami kenaikan menjadi 0.728. Laporan ini dikeluarkan oleh UNDP pada 27 November 2007, Indonesia berada pada peringkat 108 sedunia dan masih di bawah Vietnam. Penilaian tersebut di antaranya usia harapan hidup menempatkan Indonesia pada posisi ke-100. Tingkat pemahaman aksara dewasa di urutan 56. Tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi ada di urutan 110. Sedangkan untuk pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita berada di posisi 113.

Deskripsi kuantitatif tersebut dapat menyadarkan semua elemen bangsa khususnya pemerintah untuk bangkit mengejar ketertinggalan, dengan melakukan penataan ke dalam, terutama di lingkungan birokrasi. Demikian pula diharapkan kebijakan publik yang lahir akan semakin mementingkan pembangunan manusia, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur bukan semakin menjauh dari sasaran. Melihat peringkat Indonesia dalam HDI, gambaran nyata memperlihatkan bahwa secara rata-rata bangsa Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain dalam hal persaingan dan penguasaan dalam era globalisasi.

Kondisi ini harus segera diperbaiki secara signifikan, tidak hanya demi memperbaiki peringkat dalam tabel HDI, lebih penting tentang cara pembangunan terhadap SDM bangsa Indonesia bisa membawa perubahan secara signifikan dalam kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Jalan keluar terbaik pembangunan kualitas hidup bangsa Indonesia adalah dengan perbaikan pada bidang pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah kunci pembangunan SDM pada suatu bangsa.

Kondisi pendidikan di Indonesia yang jauh dari mutu menjadikan tujuan pendidikan menjadi bias. Sebagaimana amanat pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3, yang menyebutkan ;

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Kondisi yang sekarang melanda pada sebagian besar peserta didik di Indonesia jauh dari tujuan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU di atas. Selain persoalan sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi pendidik dan kualifikasi pendidik, persoalan lain juga yang lebih penting adalah tingkat moralitas peserta didik yang semakin melorot. Dalam survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat hasil survei pada 2010 menunjukkan, 51 persen remaja di Jabodetabek telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Hasil survei untuk beberapa wilayah lain di Indonesia, seks pra-nikah ini juga dilakukan beberapa remaja, misalnya saja di Surabaya tercatat 54 persen, di Bandung 47 persen dan 52 persen di Medan. Bahkan hasil penelitian di Yogya dari 1.160 mahasiswa, sekitar 37 persen mengalami kehamilan sebelum menikah.

Selain itu, data tentang penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa dari 3,2 juta jiwa yang ketagihan narkoba, 78 persennya adalah remaja. Sedangkan penderita HIV/AIDS terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada akhir Juni 2010, terdapat 21.770 kasus AIDS dan 47.157 kasus HIV positif dengan persentase pengidap usia 20-29 tahun, yaitu 48,1 persen dan usia 30-39 tahun sebanyak 30,9 persen. Selain itu kasus penularan terbanyak adalah heteroseksual sebanyak 49,3 persen, homoseksual sebanyak 3,3 persen dan IDU (jarum suntik) sebanyak 40,4 persen.

Secara filosofis, persoalan-persoalan di atas terjadi karena sistem pendidikan di Indonesia masih menerapkan pola dikotomis menjadikan posisi dan pelaksanaan pendidikan nilai dan keagamaan mendapatkan alokasi sedikit. Di satu sisi, kepemimpinan organisasi pendidikan tidak banyak yang mempersonifikasi jiwa *leader* dan *manager* dalam menerapkan kebijakan sekolah. Hal ini untuk mempertegas bahwa tanggung jawab mengembangkan sumber daya manusia adalah semua warga Indonesia, lebih utama adalah warga sekolah.

B. Perkembangan Organisasi Pendidikan Indonesia

Sejarah pengelolaan lembaga pendidikan formal dan non-formal di Indonesia dimulai sejak era penjajahan kolonialisme Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, urusan agama ditangani berbagai instansi atau kementerian. Belanda menilai bahwa proses keterlibatan pemerintah di dalam urusan keagamaan hanya akan membawa kepada masalah-masalah yang berujung kepada penggalangan kekuatan untuk perlawanan.² Pada masa kemerdekaan masalah-masalah agama dan pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan secara resmi

²Hal ini dikarenakan Belanda melihat Islam tidak hanya sebagai institusi agama, menurut Snouck Hurgronje, Islam dilihat oleh Belanda sebagai pranata ibadah, sosial keagamaan dan kekuatan politik. Lihat M. Fathoni, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2005), 53.

diurus satu lembaga yaitu Departemen Agama. Keberadaan Departemen Agama dalam struktur pemerintah Republik Indonesia melalui proses panjang. Sebagai bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia, Departemen Agama didirikan pada 3 Januari 1946. Dasar hukum pendirian ini adalah Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946.

Jika pada jaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang masalah-masalah agama, terutama Islam, menjadi bagian dari pemerintahan penjajah, maka wajar dan dapat dipahami jika umat Islam pada masa kemerdekaan menuntut adanya lembaga yang secara khusus menangani masalah-masalah agama dalam bentuk Kementerian Agama.

Mohammad Yamin adalah orang yang mula-mula mengusulkan dalam salah satu sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) agar pemerintah Republik Indonesia, di samping memiliki kementerian pada umumnya, seperti luar negeri, dalam negeri, keuangan dan sebagainya, membentuk juga beberapa kementerian negara yang khusus. Salah satu kementerian yang diusulkannya ialah Kementerian Islamiyah, yang katanya, “memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati”. Tetapi meskipun beberapa usulnya tentang susunan negara bisa diterima dan menjadi bagian dan UUD 1945, usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan.

Mungkin karena ketika dia mengajukan usul ini *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta dengan “tujuh kata bertuah” yang merupakan kompromi antara golongan “Islam” dan “nasionalis” telah tercapai. Bukankah ucapan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” telah mencakup semuanya? Hanya saja, setelah Proklamasi Kemerdekaan telah diucapkan dan konstitusi harus disahkan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945, atas usul Bung Hatta, yang didukung oleh beberapa tokoh Islam, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengganti tujuh kata bertuah itu, dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam rapat tersebut, Latuharhary, seorang tokoh Kristen dari Maluku, mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas, seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusumasumantri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama, tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Dia sependapat dengan pikiran Latuharhary. Ki Hadjar Dewantoro, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul

Kementerian Agama akhirnya ditolak. Hanya enam dari 27 anggota PPKI yang setuju didirikannya Kementerian Agama.

Ketika Kabinet Presidensial dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan Nopember, ketika kabinet Presidential digantikan oleh kabinet parlementer, di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1946 oleh KH. Abudardiri, KH. Saleh Su'aidy dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; *“Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri”*.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekamo memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan bahwa keberadaan Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi : *“Presiden Republik Indonesia, Mengingat : Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan : Mengadakan Departemen Agama”*. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia dan disiarkan oleh pers dalam dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah dan merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari *Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor untuk Urusan Pribumi [Islam]) pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih

jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Tetapi argumen ini dibantah oleh dokumen resmi yang diterbitkan pemerintahan Soekamo. Dalam buku *20 Tahun Indonesia Merdeka*, jilid VII, dinyatakan bahwa di jaman kolonial Belanda, soal-soal yang berkaitan dengan urusan agama diurus terpecah-pecah dalam beberapa departemen. Sebagai contoh soal urusan haji, perkawinan, pengajaran agama diurus oleh *Departement van Binnenland sche Zaken* (Departemen Dalam Negeri). Soal Mahkamah Islam Tinggi, Raad Agama (Peradilan Agama) serta penasihat Pengadilan Negeri diurus oleh *Departement van Justitie* dan lain sebagainya. Kemudian di jaman penjajahan Jepang, urusan agama itu dipegang oleh *Shumubu*, sebagai bagian dari *Gunseikanbu*, sedang di daerah-daerah diurus oleh *Shumuka* sebagai bagian dari pemerintah karesidenan. Oleh karena itu, keberadaan Departemen Agama adalah suatu departemen yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan jaman penjajahan, karena dilahirkan seiring dengan Proklamasi Rakyat Indonesia menentang penjajahan itu. Departemen Agama ditampilkan ke tengah-tengah forum perjuangan oleh rakyat yang berjuang itu sendiri sebagai cermin jiwa dan kehendak aspirasi rakyat terbesar.

KH. Abdul Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri Agama pada 1950-1952, menyatakan bahwa adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah-masalah Islam, karena jumlah penduduk Muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non-Muslim. Karena itu, lanjutnya, tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum Muslimin tidak sama besarnya dengan penanganan masalah-masalah kaum non-Muslim. Jadi, perbedaan ini tidaklah didasarkan pada diskriminasi agama.

Kementerian Agama di masa Rasjidi adalah “kementerian revolusi”. Sejak dikeluarkannya keputusan pembentukannya di seluruh Indonesia, Kementerian Agama mulai 12 Maret 1946 berkantor di ibukota revolusi, Yogyakarta, ketika Belanda kembali menguasai Jakarta. Dalam Maklumat Kementerian Agama No. 1 tanggal 14 Maret 1946 diumumkan bahwa alamat sementara Kantor [pusat] Kementerian Agama adalah di Jln. Bintaran No. 9 Yogyakarta. Kemudian dalam surat No. 187/VII tanggal 8 Mei 1946, alamat Kementerian Agama pindah ke Jln. Malioboro No. 10 Yogyakarta. Kantor ini tersedia berkat jasa baik KH. Abu Dardiri dan KH. Muchtar (Departemen Agama, 1980/81: 28). Kondisi ini berlangsung selama beberapa tahun sebelum akhirnya pusat pemerintahan kembali pindah ke Jakarta.

Sistem politik yang berlaku waktu itu menyebabkan kabinet sering berganti. Pergantian Kabinet berarti pula pergantian menteri. Dalam periode 1946-1950, misalnya, Kementerian

Agama dipimpin 11 orang menteri yang bergantian seirama dengan pergantian kabinet, yang terbentuk dan jatuh berulang kali dalam tempo yang sangat singkat. Dalam Kabinet Sjahrir II, misalnya, H.M. Rasjidi sebagai Menteri Agama pertama hanya menjabat selama kurang lebih enam bulan (12 Maret - 2 Oktober 1946).

Sebelum “negara kesatuan” terbentuk, Pemerintah RI yang berada di bawah kekuasaan kabinet pimpinan Perdana Menteri dr. A. Halim, Menteri Agamanya yang ditunjuk waktu itu adalah KH. Faqih Usman. Pada saat yang sama kabinet dalam Pemerintahan RIS yang di bawah pimpinan Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta (merangkap sebagai Wakil Presiden), Menteri Agamanya adalah KH. A. Wahid Hasyim. Untuk menjaga keutuhan sebagai langkah ke arah persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI, kedua Menteri Agama tersebut, membuat kesepakatan bersama pada tanggal 7 Juni 1950, yang isinya antara lain : tugas-tugas Kementerian Agama diatur sedemikian rupa agar tercipta satu Kementerian Agama, sedangkan struktur organisasi Kementerian Agama disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1949.

Sebagai realisasi kesepakatan bersama tersebut, pada tanggal 10 Agustus 1950 ditandatangani sebuah naskah persetujuan oleh kedua orang Menteri Agama yaitu KH. Faqih Usman dan KH. A. Wahid Hasyim. Naskah tersebut memuat tentang ketentuan mengenai susunan organisasi Kementerian Agama, tempat kedudukan, bidang kerja serta pembagian tugas Kantor Kementerian Agama di Jakarta dan Yogyakarta. Naskah pelaksanaan persetujuan pembentukan Kementerian Agama NKRI ini, sebagai persiapan menjelang pembentukan Kabinet NKRI di bawah Perdana Menteri Moh. Natsir pada tanggal 16 September 1950.

Eksistensi kelembagaan Kementerian Agama sebagai suatu lembaga pemerintahan lebih kokoh setelah terbentuknya negara kesatuan NKRI. Saat itu struktur keorganisasian dan kelembagaannya didasarkan pada Penetapan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1950, tanggal 16 September 1950. Secara umum kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama, antara lain :

1. Anjuran BPKNP yang menyatakan bahwa : madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntutan dan bantuan material dari pemerintah.³

³H.A. Timur Djaelani, sebagaimana dikutip Syamsul Nizar (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 345.

2. Pendirian Kementerian Agama yang berdasar atas hukum Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946.

Penandatanganan SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan⁴ tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pengelolaan di lingkungan sekolah agama ditangani oleh departemen agama sendiri.

C. Ilmu Pengetahuan dalam Spektrum Sejarah Islam

Pengetahuan ilmiah orang Arab pada mulanya sangat terbatas dan secara umum bersandar pada mitologi. Orang-orang yang punya rasa ingin tahu, begitu masuk Islam, tertarik atau bahkan terpesona dengan pengetahuan kuno. Al-Qur'an tidak melarang penyelidikan jagad raya dan sebaliknya justru menganjurkan kegiatan ini sebab penggunaan pengetahuan secara benar akan menghasilkan kebaikan. Itulah sebabnya para ilmuwan masa awal secara terbuka mengambil pengetahuan baru ini dan menggabungkannya dalam kerangka kerja intelektual mereka.

Mengikuti tradisi para multidisipliner Yunani, para ilmuwan di dunia Islam juga melakukan kajian di semua bidang pengetahuan. Penafsiran atas pernyataan al-Qur'an untuk menyelidiki jagad raya terus mendorong penelitian mereka. Setelah menyerap karya-karya terjemahan yang berasal dari Yunani dan Persia, ilmuwan-ilmuan Muslim melakukan kajian secara bebas. Konsep kebebasan intelektual ini diwariskan kepada Barat melalui Universitas Jerman yang menyebarluaskan konsep kebebasan untuk mengajar dan kebebasan untuk belajar, yang belakangan berkembang menjadi konsep modern tentang kebebasan akal manusia (*free will*), seperti pada masyarakat modern.

Pada awalnya, sikap Islam terhadap hubungan antara pengetahuan dan kebenaran tidak memiliki definisi yang jelas, tetapi sejak awal beberapa premis dasar tentang pengetahuan telah muncul dalam pikiran para ulama sebagaimana ditafsirkan dalam al-Qur'an dan hadits. Ajaran yang paling mendasar dalam bidang pemikiran ilmiah Islam adalah bahwa pengetahuan mengandung semua kebenaran dan pengetahuan. Dari sini lahir dua prinsip. *Pertama*, bahwa pengetahuan tidak termasuk rincinya, sudah ada dalam al-Qur'an. *Kedua*, bahwa al-Qur'an dan hadits mendefinisikan lingkungan dan nilai-nilai yang *inherent* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kedua premis pokok inilah yang mendasari

⁴Zulhandra, "Pola Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Pada Orde Lama" dalam Syamsul Nizar (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 348.

pandangan Islam bahwa semua pengetahuan akhirnya menuju kepada Tuhan. Dalam kenyataannya, sejarah kedua macam pengetahuan yaitu pengetahuan agama dan pengetahuan umum dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Ibu Khaldun, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir, menyebutkannya dengan istilah pengetahuan *naqliyyah* (diwahyukan) dan pengetahuan *'aqliyyah* (dipikirkan), sedangkan al-Syaibani, menyebutnya dengan pengetahuan fitriyah pembawaan dan pengetahuan yang dipelajari.

Saat pemikiran dan keterampilan demikian maju, ketika keimanan dan pemikiran tidak sejalan, hubungan antara pengetahuan yang diwahyukan dengan pengetahuan yang diperoleh “agak terganggu” sehingga muncul keterpisahan antara keduanya. Inilah pandangan sekuler. Keterpisahan ini sebenarnya menimbulkan konflik, baik dalam diri perseorangan maupun dalam masyarakat, konflik pribadi dan sosial. Oleh karena itu keterpisahan itu seharusnya diakhiri dan pengetahuan yang terpisah itu harus disatukan lagi.⁵

Pengintegrasian kembali kedua pengetahuan itu harus dimulai dengan membangun kembali “Filsafat Pengetahuan Islam” dan mengintegrasikan kembali sistem pendidikan umum dan agama. Orang Islam harus segera menyadari bahwa tradisi aslinya telah dikacaukan oleh tradisi Barat. Tradisi Barat memang memisahkan antara pengetahuan yang diwahyukan dan pengetahuan yang diperoleh. Oleh karena itu dalam konsep Islam ilmu pengetahuan hanya satu. Untuk kepentingan pendidikan, pengetahuan yang satu itu harus diklasifikasikan. Klasifikasi pengetahuan itu ialah pengetahuan yang diwahyukan dan pengetahuan yang diperoleh.

D. Menuju Sistem Pendidikan Terintegrasi

Terdapat dua cara yang sangat dibutuhkan jika diinginkan lahirnya pola pendidikan yang terintegrasi. Cara yang pertama menyangkut upaya mengintegrasikan pengetahuan umum dan agama, sedangkan cara yang kedua adalah mengintegrasikan karakteristik *leader* dan karakteristik *manager* dalam organisasi pendidikan formal.

1. Integrasi Sains Umum dan Agama

Upaya mengintegrasikan pengetahuan umum dan agama ke dalam satu bentuk lembaga pendidikan. Korelasi Islam dengan kategori keilmuan seperti konsep ilmu pengetahuan umumnya berhadapan dengan pengertian Islam sebagai sesuatu, yang dalam kategori Islam dapat dilihat sebagai, kekuatan iman dan takwa, sesuatu yang sudah final. Sedangkan

⁵Tentang keterpisahan ilmu menjadi dua ini, baca buku Mukani, *Pergulatan Ideologis Pendidikan Islam* (Malang : Madani Media, 2011).

kategori ilmu seperti disebutkan di atas, memiliki ciri khas berupa perubahan perkembangan dan tidak mengenal kebenaran absolut. Semua nilai kebenarannya bersifat relatif. Islam, yang dilihat dari sudut pengembangan ilmu pengetahuan, adalah sesuatu yang masih dalam proses, artinya masih terus menerus dicari dan dikembangkan, belajar terus tanpa henti untuk mencari dan menemukan Islam.

Menurut catatan sejarah, filsafat dan ilmu pengetahuan serta teknologi keduanya dilahirkan dan dikembangkan pertama kali oleh bangsa Yunani dengan mendasarkan pada hukum alam (*natural law*). Mereka meyakini bahwa kebenaran mutlak hanya ada di alam idea. Sedangkan yang ada di dunia hanyalah bayangan dari kebenaran alam idea itu. Oleh karena itu sifatnya relatif. Para ahli Yunani sejak ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir di dunia ini sudah mengingatkan kepada seluruh ilmuan bahwa ada orde yang tidak mungkin dilampaui oleh manusia dan oleh siapapun, yaitu orde alam. Karena bangsa Yunani tidak mengenal agama Samawi, maka filsafat dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan adalah sekuler. Bahkan universitas-universitas modern yang berdasarkan model-model Barat tidak mencerminkan manusia, melainkan lebih mencerminkan negara sekuler.

Masalah hukum alam, oleh sebagian orang Islam, dikembangkan menjadi *sunnatullah*. Kerja ini disebut dengan mengislamisasikan. Hukum alam adalah ciptaan Allah SWT dan kebenaran di alam idea menjadi kebenaran Allah SWT. Maksudnya, kebenaran mutlak yang *haq* itu hanya ada pada Allah SWT. Sedangkan kebenaran duniawi adalah kebenaran relatif yang harus secara menerus dikembangkan berdasarkan perspektif kebenaran Allah SWT. Dengan demikian dalam pemahaman nalar Islami, pengembangan ilmu pengetahuan tetap menggunakan metodologi keilmuannya secara intrinsik dan menjadi tuntutan universal.

Dalam pandangan Islam, ilmu sudah terkandung secara esensial dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, berilmu berarti beragama dan beragama berarti berilmu, maka tidak ada dikotomi antar ilmu dan agama. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas dinilai atau dikritik, menilai dan menggugat kembali keabsahan dan kebenaran suatu pendapat adalah diharuskan tanpa menilai yang berpendapat. Bahkan, seorang ilmuwan dengan senang hati melemparkan pendapatnya untuk nilai dan bukan untuk dipertahankan, karena yang dicari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Oleh karena itu dalam Islam diharapkan muncul intelektual yang bersifat jujur, berpengalaman, rendah hati dalam arti menerima kemungkinan kebenaran orang lain dan tidak mengisolir diri sehingga ilmuwan Islam berbeda dan memiliki identitas diri dengan ilmuwan non-muslim. Itulah sebabnya pandangan Barat sangat sulit

untuk menampilkan sisi harmonis antara kedua variabel di atas. Barat tidak akan mampu menjembatani dikotomi tersebut karena Barat telah berkembang terlalu jauh di atas perpaduan berbagai nilai kebudayaan Yunani, Romawi Kuno dan lain-lain. Meskipun telah berusaha bangkit kembali menemukan “barang yang lepas” dan hal ini amat terasa sejak abad XIX dan awal abad XX Masehi, umat Islam tetap harus kerja keras untuk mengejar ketertinggalan, apalagi era yang dihadapinya saat ini telah memasuki jaman *post-modern*. Rasanya, umat Islam akan tetap tertinggal jika terus berpikir reaktif dan bukan pro-aktif atau responsif untuk menguasai kembali ilmu pengetahuan.

Bagi Muhammad Arkoun, pemikiran umat Islam belum mampu keluar dari kungkungan antara lain disebabkan oleh dominasi, *pertama*; gambaran dogmatis dari suatu nalar yang mampu mencapai keberadan Allah, *kedua* ; dorongan utama dari setiap penemuan tidaklah bersifat ilmiah, tetapi bersifat estetis etis, *ketiga* ; akal yang merupakan refleksi dan inteligensi adalah ciptaan Allah dan dikuasai oleh gagasan untuk kembali kepada Pencipta Pertama dan *keempat* ; bahwa kegiatan-kegiatan nalar menyatakan sesuatu dalam usaha kembali ke landasan-landasan agama.

Paradigma alternatif ilmu pengetahuan yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan filsafat teosentris dan antroposentris secara bersama-sama. Berdasarkan model ini, paradigma baru pendidikan Islam yang ingin dikembangkan adalah tidak adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan dan agama, tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan agama, ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas dinilai, mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional melainkan juga sisi rasional.

Untuk memenuhi hal di atas tawaran yang mungkin dikedepankan adalah bahwa setiap ilmuwan harus mampu berpikir dan mengembangkan keilmuannya dalam lingkup iman adan takwa. Tentu, konstruksi pemikiran yang ditawarkan harus dipengaruhi oleh pandangan-pandangan, filosofis, teologis dan sosiologis serta hal-hal yang melingkupinya. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan metodologi yang baru. Metodologi yang tepat untuk hal ini adalah pengembangan metode rasional dan empirik serta memadukan aspek tradisional dan modern sesuai dengan sifat, corak dan kebutuhannya.

2. Integrasi Karakteristik *Leader* dan *Manager* di Organisasi Pendidikan

Dalam Islam, kepemimpinan telah menempatkan sangat penting sehingga memperoleh perhatian yang besar. Kedudukan kepemimpinan mempunyai posisi penting sehingga setiap kelompok memiliki pemimpin. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya : *dari Abu Said dari Abu Hurairah bahwa keduanya berkata, Rasulullah*

bersabda, Apabila tiga orang keluar bepergian, hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin (HR. Abu Dawud).⁶

Kepemimpinan memiliki kedudukan penting, tidak hanya dalam ajaran Islam, tetapi kajian manajemen intinya terletak dalam kepemimpinan. Kepemimpinan memperoleh perhatian serius karena menyangkut manajemen dalam merancang, mengorganisasi dan mengawasi terhadap proses perbaikan SDM. Kepemimpinan perlu memperhatikan standar visi, misi dan tujuan sekolah agar tercapai kualitas SDM. Hal ini perlu didukung kemampuan membaca kondisi dan menetapkan keunggulan SDM. Pemimpin perlu memperoleh dukungan lingkungannya dan bersedia bergerak mencapai standar keunggulan yang telah disepakati bersama-sama. Keberanian mengambil peran strategis dalam melaksanakan kepemimpinan. Artinya kepemimpinan organisasi harus dapat mengembangkan peraturan-peraturan yang sudah baku menuju perubahan bersama. Ini memberikan tempat dinamika pemimpin berinisiatif di lingkungan organisasi pendidikan.⁷

Dubrin berpendapat bahwa pemimpin yang efektif adalah kepemimpinan visioner yang memiliki ragam ide dalam menggerakkan lembaga.⁸ Kepemimpinan visioner ditandai oleh kemampuan mengelola intuisi yang berhubungan dengan fokus pengembangan organisasi dan lingkungan pendidikan, kemampuan mengelola visi organisasi pendidikan untuk mengukur gagasan-gagasan yang mengandung skenario ideal tentang masa depan dan keterwujudan kenyataan dan kemampuan menganalisis tantangan dan hambatan menjadi kekuatan dan peluang berdasarkan riset kepemimpinan yang berhasil mencapai kemajuan.

Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberikan arti usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota lembaga pendidikan dengan cara memberi arahan yang berdasarkan visi yang jelas. Kepemimpinan ini berarti harus responsif mengamati lingkungan guna menemukan perubahan yang positif agar mampu mempengaruhi organisasi pendidikan. Pemimpin harus secara aktif mendukung lingkungan sekolah untuk bersedia setiap saat menghadapi perubahan lingkungan secara pesat. Menjadi *perceptive*, *nimble* dan *innovative* dalam lingkungan yang berubah pesat akan memberikan manfaat bagi organisasi.

⁶Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asyat al-Sajistami al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud* (Jakarta : Maktabah Dahlan, tt.).

⁷Made Pidarta, *Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar* (Jakarta : Gramedia, 1995), 81.

⁸Andrew J. Dubrin, *The Complete Idiots Guides to Leadership*, 2nd Edition, terj. Tri Wibowo BS (Jakarta : Prenada, 2006), 140.

Peran pemimpin visioner dalam Nanus memiliki ada empat peran yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan kepemimpinannya, yaitu⁹:

1. Peran penentu arah (*direction setter*). Peran ini merupakan peran seorang pemimpin dalam menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi, guna diraih pada masa depan dan melibatkan orang-orang. Hal ini bagi para ahli dalam studi dan praktik kepemimpinan merupakan esensi dari kepemimpinan. Sebagai penentu arah, seorang pemimpin menyampaikan visi, mengkomunikasikannya, memotivasi pekerja dan rekan serta meyakinkan orang bahwa hal yang dilakukan merupakan hal yang benar dan mendukung partisipasi kepada seluruh tingkat dan pada seluruh tahap usaha menuju masa depan.
2. Agen perubahan (*agent of change*). Agen perubahan merupakan peran penting kedua dari seorang pemimpin visioner. Dalam konteks perubahan, lingkungan eksternal adalah pusat. Ekonomi, sosial, teknologi dan perubahan politis terjadi secara terus-menerus, beberapa berlangsung secara dramatis dan yang lainnya berlangsung dengan perlahan.
3. Juru bicara (*spokesperson*). Memperoleh pesan ke luar dan juga berbicara, boleh dikatakan merupakan suatu bagian penting dari memimpin masa depan suatu organisasi. Seorang pemimpin efektif adalah juga seseorang yang mengetahui dan menghargai segala bentuk komunikasi tersedia guna menjelaskan dan membangun dukungan untuk suatu visi masa depan.
4. Pelatih (*coach*). Pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik. Dengan ini berarti bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi yang dinyatakan.

Kepemimpinan visioner mempertegas bahwa kekuatan daya dan usaha bersama untuk menggerakkan semua sumber daya manusia dan alat (*resources*) yang tersedia di suatu unit pendidikan. *Resources* tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu *human resources* dan *non-human resources*. Lembaga pendidikan yang termasuk salah satu unit organisasi, juga terdiri dari berbagai unsur atau sumber dan manusia adalah yang merupakan unsur terpenting. Menurut Gorton,¹⁰ yang disebut perangkat sekolah seperti kepala sekolah, dewan guru, siswa dan seluruh staf, harus saling mendukung untuk saling bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁹Nanus, Burt and Visionary, *Leadership : Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization*, terj. Frederik Ruma (Jakarta : Prenhallindo, 2011), 15-18.

¹⁰R.A. Gorton, *School Administration* (American : WMC Brown Company Publisher, 1976), 178.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa kesuksesan suatu organisasi pendidikan adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Dia mampu menumbuhkan iklim kerja sama agar dapat menggerakkan sumber-sumber lembaga sehingga dapat mendayagunakannya dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan adalah kemampuan mempersiapkan diri untuk dapat mempengaruhi, mendorong dan menggerakkan untuk membentuk proses pencapaian tujuan yang peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Sebagaimana yang dijelaskan tabel karakteristik *leader* dan karakteristik *manager* berikut ini¹¹ :

Karakteristik Pemimpin dan Karakteristik *Manager*

Pemimpin	Manager
Vision	Plan
Inspiratif	Reward
Empower	Direct
Coach	Train
Revenues	Expenses
Forecasts	Budgets
Possibilities	Systems and Procedures
Opportunity	Schedule
Synergy	Coordinate

Bennis¹² membedakan karakteristik antara pemimpin dan *manager*. Dua istilah tersebut akan lebih baik terintegrasi dalam kepemimpinan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tidak hanya membutuhkan karakteristik pemimpin, lembaga pendidikan juga membutuhkan karakteristik manager. Menurut Bennis :

Leaders are people who do the right things and managers are people who do things right. Leaders are interested in direction, vision, goals, objectives, intention, purpose, and effectiveness – the right thing. Managers are interested in efficiency, the how – to, the day, to – day, the short run of doing things right.

Karakteristik pemimpin adalah memiliki visi yang mampu memandu dalam mengelola organisasi pendidikan secara terus-menerus. Visioner menghadirkan dunia makna mimpi masa depan yang perlu direspon agar impian-impian organisasi yang dapat mewujudkan mutu SDM. Ini akan menciptakan *precipitating factor* (faktor pemicu) yang menggerakkan cipta, rasa, karsa dan karya. Visioner dapat memberikan inspirasi, menggugah emosi, membangkitkan antusiasme dan menyuntikkan motivasi. Motivasi individu maupun

¹¹Richard L. Hughes, Robert Ginnert and Gordon J. Curphy, *Leadership : Enhancing the Lessons of Experience* (New York : McGraw-Hill Irwin, 2002), 387.

¹²W. Bennis dan R. Townsend, *Reinventing Leadership* (New York : William Morrow and Company, 1995), 6.

kelompok dapat menimbulkan *sense of direction*, menunjukkan arah yang perlu ditempuh. Kemampuan mengarahkan didorong dapat memberikan *sense of urgency*, kemampuan untuk membedakan terhadap pada masalah-masalah darurat. Dengan demikian, visioner memberikan arah pada pimpinan untuk membuat segmentasi kepada fokus dan target yang sudah dicapai untuk dikoreksi saat tujuan yang dicapai belum maksimal dan membuat segmentasi yang memprioritas pembangunan sumber daya manusia yang dirintis dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

E. Penutup

Jika dicermati dengan seksama, dapat dimengerti bahwa saat ini ilmu-ilmu agama sedang mengalami tantangan yang sangat berat. Terjadinya dikotomi pengetahuan sebagaimana yang ada di Indonesia, bagi penulis merupakan hasil kekurangcermatan para pendahulu atau perintis pendidikan yang tidak mampu menjadikan pesantren sebagai basis kelahiran dari pendidikan nasional. Sekolah Belanda yang kemudian menjiwai kelahiran pendidikan nasional adalah warisan sekuler yang sengaja memisahkan masalah keagamaan dengan pengetahuan modern yang melahirkan pemisahan pengetahuan agama dan modern.

Saat ini dikotomi itu harus dihilangkan dengan dua cara. *Pertama*, mengintegrasikan pengetahuan umum dan pengetahuan agama dalam satu bentuk pelajaran (kurikulum) dan juga lembaga atau institusi. *Kedua*, mengintegrasikan pemimpin dan *manager* dalam satu diri pengelola atau kelompok pengelola sebuah lembaga pendidikan.

Kepemimpinan organisasi pendidikan adalah satu cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Organisasi pendidikan yang memfokuskan secara struktur dan secara terukur dalam setiap jenjang pendidikan formal. Kemampuan pemimpin perlu ditunjang oleh jiwa visioner. Jiwa ini dapat menggerakkan semua komponen yang ada dalam sistem pendidikan. Jiwa ini akan mempersonifikasi dan mempersuasi arah pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan harapan masyarakat dan bangsa. Kemampuan kepemimpinan melandasi karakteristik *leader* dan *manager* adalah langkah konseptual yang melekat pada diri. Era global meniscayakan transformasi jiwa dan nilai kepemimpinan yang relevan dengan konteks jaman.

Pendekatan di atas menjadi alternatif tawaran memperbaiki sumber daya manusia Indonesia yang mengalami penurunan di era global dan era kompetisi ini. Pola pikir (*mindset*) pengelola pendidikan sudah sepantasnya harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama menjadi spirit dan filosofis untuk mentransformasi kualitas

sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang handal dan visioner merupakan langkah memperbaiki bangsa.*

BILIOGRAPHY

- Al-Azdy, Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asyat al-Sajistami. *Sunan Abi Dawud*. Jakarta : Maktabah Dahlan, tt.
- Bennis, W. dan R. Townsend. *Reinventing Leadership*. New York : William Morrow and Company, 1995.
- Burt, Nanus and Visionary. *Leadership : Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization*, terj. Frederik Ruma. Jakarta : Prenhallindo, 2011.
- Dubrin, Andrew J. *The Complete Idiots Guides to Leadership*, 2nd Edition, terj. Tri Wibowo BS. Jakarta : Prenada, 2006.
- Fathoni, M. *Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Departeman Agama RI, 2005.
- Gorton, RA. *School Administration*. American : WMC Brown Company Publisher, 1976.
- Hughes, Richard L., Robert Ginnert and Gordon J. Curphy, *Leadership : Enchancing the Lessons of Experience*. New York : McGraw-Hill Irwin, 2002.
- Mukani. *Pergulatan Ideologis Pendidikan Islam*. Malang : Madani Media, 2011.
- Nizar, Syamsul (ed.). *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasullah Sampai Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Pidarta, Made. *Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar*. Jakarta : Gramedia, 1995.
- Zulhandra. "Pola Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Pada Orde Lama" dalam Syamsul Nizar (ed.). *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasullah Sampai Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group, 2007.